

KEHADIRAN KYAI INDEPENDEN DALAM DINAMIKA SOSIAL-POLITIK

*(Telaah atas Posisi dan Peran Kyai dalam Merespon Perpolitikan
di Indonesia Pada Era Reformasi)*

*Oleh : Asmaun Sahlan **

ABSTRAK

Sebenarnya ada sebagian masyarakat mengharapkan posisi dan peran kyai berdiri independent tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, tidak terkontaminasi oleh hingar-bingar dan panasnya perpolitikan. Kehadiran kyai ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi *maral force* dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Kiyai, Politik, Era Reformasi

A. Pendahuluan

Kyai, sebagai sebutan kehormatan bagi elit agama khususnya di Jawa, masih sering diperdebatkan lebih-lebih jika dikaitkan dengan politik. Pro-kontra seputar peran Kyai di wilayah politik praktis masih menjadi perbincangan dalam masyarakat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kyai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri.

Namun, persoalan yang cukup pelik adalah ketika elit agama atau Kyai memainkan peran ganda antara agamawan di satu sisi dan politikus di sisi lain yang diperankan dalam waktu bersamaan. Pertanyaannya adalah: “apakah mungkin produk-produk pemikiran dan tindakan elit agama bisa bebas dari nilai-nilai yang mewarnai pandangan hidup mereka?” hal tersebut sukar dibayangkan bisa terjadi. Karenanya, produk pemikiran dan pilihan-pilihan politik elit agama akan sukar dipisahkan dari warna pemahaman keagamaan yang dipunyainya. Keragaman pemikiran dan pilihan dalam dunia politik antar elit agama, agaknya juga bersumber dari pemahaman dan interpretasi keagamaan yang berbeda-beda di antara mereka.

Berangkat dari persoalan tersebut, sebenarnya ada sebagian masyarakat mengharapkan posisi dan peran kyai berdiri independent tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, tidak terkontaminasi oleh hingar-bingar dan panasnya perpolitikan. Kehadiran kyai ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi *maral,force* dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia.

Di sisi lain ada pula sebagian masyarakat yang mengharapkan peran Kyai atau elit agama berperan lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia ini.

Melalui tulisan ini berusaha menelaah posisi dan peran kyai dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Secara sederhana posisi dan peran kyai tersebut dapat mengambil peran aktif dalam politik praktis dan ada yang menjaga jarak dan lebih memposisikan diri secara independen sebagai pemimpin, pengayom, dan penyejuk hati umat. Untuk menyederhanakan peristilahan, penulis memberikan predikat terhadap dua kategori kyai tersebut dengan sebutan Kyai Politik, untuk tipe pertama dan Kyai *Independen* untuk tipe kedua, kyai dalam konteks ini juga dipakai untuk menyebut elit agama secara umum. Selanjutnya pembahasan ini diawali dengan tipologi dan variasi kyai, dilanjutkan dengan interrelasi antara agama dan politik (mempersoalkan peran kyai politik), mengharapkan kehadiran kyai independen, dan diakhiri dengan kesimpulan.

B. Variasi dan Tipologi Kyai

1. Seputar Sebutan Kyai

Peristilahan kyai muncul pertama kali dari bahasa Jawa. Kata-kata kyai dalam pemahaman masyarakat Jawa mempunyai makna yang agung, keramat dan dituakan. Selain untuk benda, seperti keris, kerbau bule, gamelan, gelar kyai juga diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arif dan dihormati. Namun demikian, penggunaan gelar kyai yang paling luas digunakan adalah untuk sebutan seorang pendiri dan pemimpin pondok pesantren, ia juga disebut sebagai orang alim artinya orang yang mempunyai pengetahuan agama yang dalam dan mampu menghayati serta mengamalkannya (Ziemek, 1986).

Penyebutan kyai biasanya juga digunakan untuk menyebut ulama, yaitu ahli-ahli pengetahuan Islam di kalangan umat Islam atau disebut juga 'Alim (orang yang mendalam pengetahuan ke-Islamannya). Di Jawa Barat mereka

disebut Ajengan, di Jawa Timur dan Jawa Tengah mereka disebut Kyai dan di Madura disebut Mak Kyae, Bindara atau Nun (Wahid, Abdurrahman, 1988)

Meskipun tidak mendirikan atau memiliki pondok pesantren, seorang ulama yang berpengaruh di masyarakat biasa juga disebut dengan kyai, seperti Kyai Ali Yafi, Kyai Fakhruddin (al-Marhum) dan lain-lain. Jadi predikat kyai merupakan gelar yang mengandung makna pemuliaan dan penghormatan yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela kepada seorang pemimpin pondok pesantren, ulama Islam, pemimpin masyarakat Islam setempat, yang tidak dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau bukan merupakan gelar akademis.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa predikat kyai adalah sebutan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada elit agama yang telah diakui kealimannya, memiliki peranan dalam kehidupan sosial-keagamaan dan masyarakat dapat merasakan adanya serta menerima tuntunan serta kepemimpinannya. Kesimpulan ini sebenarnya masih bersifat umum, pengertian kyai sebenarnya tidak dapat digeneralisasi, karena itu lebih jauh perlu pemahaman terhadap variasi dan tipologi kyai.

2. Variasi dan tipologi Kyai

Kyai yang sekilas tampak homogen, jika dilihat secara seksama ternyata amat variatif. Perbedaan itu diakibatkan oleh banyak faktor. Misalnya, bersumber dari perbedaan mereka dalam mempersepsi dan memahami ajaran agama itu sendiri, lingkungan dimana masing-masing kyai itu hidup dan dibesarkan, kondisi ekonomi, dan juga faktor sosial-politik. Muncul dan berkembangnya berbagai aliran keagamaan di berbagai tempat adalah bukti bahwa selalu adanya perbedaan pemahaman, persepsi dan atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami ajaran agama sehingga melahirkan pengertian yang berbeda. Di kalangan kyai kemudian muncul istilah kyai fiqh, kyai tasawuf, dan kyai kalam atau kyai alat (kyai yang menguasai bahasa arab).

Selain itu, dilihat dari kemampuan ekonomi, terdapat kyai yang berekonomi kuat, sehingga memiliki independensi yang kokoh. Dan sebaliknya, ada kyai yang secara ekonomi lemah sehingga ia tidak memiliki independensi dan akibatnya selalu bergantung pada pihak-pihak lain. Secara politik terdapat kyai yang memiliki orientasi kekuasaan sebab itu ia ikut dalam aktivitas politik, ada kyai yang dekat dengan penguasa, kyai yang independen dan kyai yang mengambil jarak dengan pemerintahan yang berkuasa.

Jika secara khusus dikaitkan dengan kehidupan politik, maka terjadi polarisasi pemikiran dan memunculkan tipologi kyai yang bervariasi. Sebagian

kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu lebih tepat jika ia mengindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kyai meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri.

Menurut beberapa hasil penelitian tentang posisi dan keterlibatan kyai dalam perubahan sosial dan politik, terdapat kesimpulan yang beragam. Geertz misalnya, menyatakan bahwa kyai dan ulama tidak memberikan apa-apa terhadap gerakan politik (Geertz, Clifford, 1982). Pandangan serupa dikemukakan oleh Deliar Noer, ia mengatakan bahwa gerakan politik lebih banyak diserahkan pada kalangan adat dan priyayi. Bahkan ia menilai, kelompok elit agama ini sangat pasif dalam menentang penjajah. Mereka lebih suka mengurung diri di pesantren, dengan mengembangkan tarekat (Noer, Delliar, 1989)

Pandangan yang amat bertolak belakang dengan itu antara lain dikemukakan oleh Horikoshi dan Dhofir (1986). Keduanya berpendapat bahwa kyai berperan banyak dalam politik. Horikoshi mengatakan bahwa elit agama yang disebut kyai cukup responsif terhadap perubahan, ia mengatakan bahwa kyai bukan *cultural broker* sebagaimana yang disebutkan oleh Geerts melainkan lebih tepat disebut sebagai *volunteer* politik meskipun dalam skala mikro di daerahnya masing-masing. Pandangan yang serupa juga dikemukakan oleh Dirdjosunjoto¹. Ia mengatakan bahwa sejak semula kyai pada posisi mendua; di satu sisi adalah seorang tokoh agama, di sisi lain ia tokoh politik. Peran itu telah dimainkan oleh para kyai dan ulama sejak dahulu hingga saat ini.

Dari pandangan tersebut jika dikaitkan dengan kehidupan politik sebenarnya secara umum dapat dikategorikan bahwa terdapat kyai atau ulama yang secara aktif terlibat dalam politik praktis dan ada juga kyai yang tidak mau terlibat langsung atau menjaga jarak dengan politik praktis. Kategori kyai pertama, menyadari bahwa berpolitik merupakan salah satu media dalam berdakwah meskipun dalam praktiknya kadang antara kyai satu dengan lainnya terjadi geb atau bahkan konflik karena perbedaan kepentingan. Secara normatif dan historik dapat dicarikan argumentasi dan alasan mengapa kyai selalu terlibat dalam aktivitas politik. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa kyai selalu terlibat dalam aktivitas politik. *Pertama*, bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup tak terbatas, tidak hanya aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan,

ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik. *Kedua*, dengan posisinya sebagai pemuka (elit) agama, ia memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu menyebabkan kyai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan ekonomi. *Ketiga*, dari sisi sejarahnya, kyai memiliki peran yang cukup besar dalam politik; yang hal itu bisa dilihat dari pergolakan melawan penjajah hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan.

Sementara itu kategori kedua adalah kyai seera independen dan bebas memposisikan dirinya sebagai pengayom umat, milik umat, sebab itu dia menghindarkan diri dari kepentingan-kepentingan yang bersifat sektarian dan keterlibatan dalam kelompok, organisasi atau partai politik tertentu, kyai kategori ini penulis memberikan predikat sebagai Kyai Independen.

C. Hubungan Antara Agama dan Politik (Mempersoalkan posisi dan peran Kyai dalam Politik Praktis)

Hubungan antara agama dan politik sampai saat ini masih menjadi perbincangan ilmiah oleh para cendekiawan muslim. Sekalipun para ilmuwan muslim tidak berbeda pandangan tentang kebenaran dan keagungan ajaran Islam, tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang posisi agama dan negara. Pertanyaan apakah Islam memerlukan bangunan negara tersendiri atautah tidak hingga kini belum memperoleh jawaban yang seragam.

Dalam kajian politik Islam kontemporer, setidaknya ada tiga aliran pemikiran tentang hubungan antara Islam dan politik. Aliran pertama berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Islam dipandang sebagai agama yang sempurna dan lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Khuttub, Syekh Muhammad Rasyid Ridla, dan yang paling gigih adalah Maulana Abul A'la al-Maududi (Azra, 1992). Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa Islam memerlukan kekuatan untuk melaksanakan syariah dan dakwah. Syariah akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kekuatan yang melaksanakan, yaitu negara. Oleh karena itu mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin. Beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar pandangannya, yaitu antara lain sebagai berikut: Qs. Al Maidah: 44, 45, 47, 48, 44; Qs At Taubah: 123.

Aliran kedua berpandangan bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad Saw. hanyalah seorang rasul biasa seperti hanya rasul-rasul sebelumnya, dan tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh aliran kedua ini antara lain Ali Abdul al-Raziq, Thoha Husein. Raziq berpendapat bahwa dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka, tetapi tidak harus berbentuk khilafah, melainkan beraneka bentuk dan sifatnya. Tidak perlunya dikait-kaitkan antara agama dan politik oleh Raziq didasarkan atas beberapa pertimbangan, *pertama*, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam perannya sebagai kepala negara tidaklah mengikuti pola tertentu yang baku, dan belum sempurna. Misalnya, pada zaman Nabi tidak terdapat sistem pengelolaan keuangan dan kepolisian sebagaimana lazimnya suatu negara. *Kedua*, berdasarkan berbagai ayat Al-Qur'an bahwa tugas Nabi terbatas pada dakwah dan mengajak manusia agar mencari keselamatan duniawi dan ukhrawi dengan menerima Islam, dan Allah memberikan hak kepada Nabi untuk memaksa orang masuk Islam. *Ketiga*, hadist Nabi yang mengatakan "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian" oleh Raziq dimaknai bahwa persoalan kenegaraan adalah urusan duniawi yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan.

Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu Agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan yang baku. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah hanya mengatur hubungan antara manusia dan Sang Maha Pencipta. Aliran ini berpandangan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etis bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh yang mewakili aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal. Aliran ini berpandangan bahwa Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam. Al-Qur'an mengajarkan beberapa prinsip dalam hidup secara individual maupun bermasyarakat, seperti prinsip tauhid, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, persamaan, keadilan, kebebasan dalam memeluk agama, dan sikap saling menghormati dalam hubungan antara umat beragama yang satu dengan yang lainnya. Tetapi prinsip-prinsip tersebut, secara teknis tidak terdapat petunjuk pelaksanaannya, sehingga dapat dimaknai dan dilaksanakan secara lentur dan fleksibel dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Di antara ketiga aliran ini, yang mendapatkan tempat di Indonesia adalah aliran yang ketiga. Para pemimpin umat Islam menyadari bahwa bangsa

Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk, baik dipandang dari sudut agama, suku, budaya dan bahasa, adat istiadat dan lainnya. Dalam konteks itu, bentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dianggap lebih tepat. Itu merupakan buah kesepakatan para pendiri negara ini, yang di dalamnya juga melibatkan sejumlah tokoh agama (ulama) di waktu itu. Hingga sekarang, para ulama maupun para cendekiawan muslim juga tidak pernah absen dalam pergumulan di dunia politik.

Hubungan antara agama dan politik dalam konteks realitas di Indonesia sebenarnya sulit dibedakan. Meskipun Kuntowijoyo mencoba membagi secara sederhana mana wilayah agama dan mana wilayah negara atau politik, tetapi pembedaan itu akan menemui kesulitan dalam realitasnya. Kunto membedakan wilayah agama dengan politik. Menurutnya, agama adalah kabar gembira dan peringatan (Q.S. Al-Baqoroh: 119), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa. Agama mempunyai khotib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara mempunyai birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, sedangkan negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam, sedangkan negara adalah kekuatan dari luar.

Pembagian yang sederhana tersebut akan menemui kesulitan jika memperhatikan fenomena agama dan politik di Indonesia saat ini. Para agamawan, saat ini bukan saja para lulusan pondok pesantren yang lebih memperhatikan aspek-aspek spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Elit agama sekarang wajahnya sudah beragam atau ganda. Mereka tidak saja memegang Al-Qur'an dan beberapa kitab kuning di tangan kanannya, tetapi juga memegang buku-buku putih yang membahas masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan bahkan teknologi. Mereka bukan saja lulusan pondok pesantren, tetapi lulusan perguruan tinggi Islam maupun umum. Bahkan, para lulusan pondok pesantren sekalipun, saat ini tidak jarang yang sehari-hari (selain mempelajari kitab kuning) juga menggeluti kitab-kitab putih itu. Karena itu, menjadi amat lumrah bila sejumlah elit agama juga sekaligus berkiprah secara mantap di dunia politik.²

Fenomena seperti digambarkan itu semakin mempersulit batas-batas antara wilayah agama dan politik. Dahulu, tatkala iklim politik belum memungkinkan, disinyalir bahwa peran politik elit agama hanyalah sebatas sebagai moral force (menurut istilah Abdurrahman Wahid) an High politics (dalam istilah Amien Rais). Tetapi dalam kenyataannya tidaklah mengenal batas-batas yang demikian itu. Peran agama yang dimainkan oleh sejumlah elitnya

tidak pernah bisa terbendung untuk memasuki wilayah-wilayah politik. Sebab, agama itu sendiri sangat kental sebagai simbol dan nilai-nilai yang hidup dalam dunia kesadaran para pemeluknya. Kesadaran ideologis yang bersumber dari pemahaman keagamaan itu, secara hirarkis-sosiologis di bawah kendali para elit agama. Karenanya, bisa dimengerti kalau sejumlah elit agama juga merasa terpanggil untuk senantiasa terlibat dalam dunia politik guna memperjuangkan kepentingan dan aspirasi keagamaan yang mereka junjung tinggi.

Mereka, elit agama yang memiliki dua wilayah peran sekaligus ini tidak mudah memilah-milah, mana otoritas agama dan manapula masuk dalam lingkup wilayah politik. Karena keduanya, wilayah agama dan wilayah politik, sama - sama sarat dengan muatan ide dan nilai-nilai yang satu sama lain bisa saling menembus dan pengaruh mempengaruhi. Bagi mereka, agama adalah keyakinan, pegangan hidup dan bahkan ideologi yang harus diamalkan dan diperjuangkan. Dengan prespektif semacam ini, maka keterlibatan elit agama dan dunia politik juga bermakna keagamaan; suatu pilihan tindakan yang disemangati pula oleh tuntutan peran mereka selaku elit agama.

Jika agama itu suatu keyakinan, pandangan hidup, ideologi, dan sumber nilai bagi para penganutnya, maka pertanyaannya adalah: "apakah mungkin produk-produk pemikiran dan tindakan elit agama bisa bebas dari nilai-nilai yang mewarnai pandangan hidup mereka?" hal tersebut sukar dibayangkan bisa terjadi. Karenanya, produk pemikiran dan pilihan-pilihan politik elit agama akan sukar dipisahkan dari warna pemahaman keagamaan yang dipunyainya. Keragaman pemikiran dan pilihan dalam dunia politik antar elit agama, agaknya juga bersumber dari pemahaman dan interpretasi keagamaan yang berbeda-beda di antara mereka. Itu merupakan kewajaran dari kenyataan agama sebagai suatu realitas sosial.

Persoalan yang cukup pelik justru muncul dalam wilayah posisi ganda yang dimainkan para elit agama, terutama jika antar mereka saling berbeda pandangan. Politisi agamawan, karena dua peran yang disandanginya, tidak jarang menghadapi kesulitan untuk menemukan kompromi politik. Dalam mengambil suatu keputusan politik, kelompok ini seperti sudah mengakomodasi semua sudut kepentingan. Sebab di satu pihak mereka merasa pengambilan keputusan itu sudah sesuai dengan aspirasi konstituen partainya yang plus juga umat beragama. Di sisi lain, naiknya mereka ke panggung politik praktis dikarenakan adanya legitimasi dari bawah sebagai pemimpin agama. Karenanya, dalam pengambilan keputusan mereka merasa telah mewakili kepentingan agama. Persoalannya kemudian adalah ketika ada aspirasi lain dari ulama *ansich*

terhadap politisi berperan ganda ini. Lebih-lebih bila aspirasi yang diajukan itu, oleh politisi yang berperan ganda tidak direspon secara positif bahkan dianggap suatu serangan terhadap kepentingan politiknya. Persoalan semacam itu bisa terjadi, karena dalam wilayah keagamaan, terutama Islam, kawasan keagamaan secara sosiologis menjadi sangat berlapis-lapis. Dengan kata lain, kritik dari ulama terhadap kelompok ini dianggap serangan dari lapisan kepentingan lain dalam agama itu sendiri. Di sinilah kemudian runyamnya, persoalan politik menjadi tidak *ansich* politik untuk masalah kenegaraan, tetapi telah ditarik ke wilayah khilafiyah dalam wilayah agama itu sendiri, seperti kasus pertentangan antara ulama PKB dan ulama PPP, atau antara kalangan PBB dan PAN, dan seterusnya. Hingga kini pertarungan politik dalam wacana mutakhir masih berkisar dalam putaran ini, dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah umat *grass root*. Mereka dituntut untuk berkiblat pada pemimpin yang beragama, yang akhirnya terjadilah suasana yang dirasakan membingungkan.

D. Mengharap Kehadiran Kyai Independen

Hingar bingar perpolitikan di Indonesia telah membawa berbagai komponen bangsa ikut andil meramaikannya tidak terkecuali kyai. Pada era reformasi ini dapat kita saksikan beberapa nama yang sebelumnya aktif sebagai agamawan, tokoh agama, juru dakwah 'beralih profesi' menjadi politikus. Nama-nama seperti Abdurrahman Wahid, Amien Rais, KH Syukran Makmun, dulunya lebih dikenal sebagai tokoh agama, pemimpin umat tetapi setelah arus reformasi bergulir mereka terjun ke dunia politik, yang terakhir ini kita saksikan sosok K.H. Zainuddin MZ yang dulu dikenal sebagai pendakwah, da'i sejuta umat, kini ikut juga berpartisipasi dalam arus politik praktis.

Kehadiran mereka dalam tataran ideal atau *das sollen*-nya, pada dasarnya memiliki motif yang sama., yakni membangun bangsa dan negara dan mengantarkannya menuju *b aldatun tayyibatun warabbun ghafur*. Tetapi dalam praktiknya (*das sein*) justru kepentingan-kepentingan yang sifatnya mikro, politis, sesaat, sektarian, golongan atau pribadi menyelimuti tujuan ideal tersebut. Sehingga yang terjadi pada akhirnya adalah *geb*, konflik diantara mereka dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat bawah (Hartono, 2003).

Dari berbagai pengalaman dinamika perpolitikan yang melibatkan elit agama, kyai atau ulama, seperti dijelaskan di atas. Kini masyarakat mulai sadar dan bersikap kritis bahkan ada yang mencurigai secara berlebihan keterlibatan kyai tersebut, sebagian masyarakat sekarang mengharapkan kehadiran sosok kyai, ulama yang benar-benar berdiri independen, tidak terkontaminasi oleh

hinggar--bingar perpolitikan, mampu memberikan penyejuk hati, ketauladanan, kepemimpinan dan menjadi pengayom umat.

Munculnya sosok seperti K. H. Abdullah Gymnastiar (atau yang sering dipanggil Aa Gym) dan Ust. Arifin misalnya, telah menjadi obat perindu bagi masyarakat. Mereka dijadikan sebagai tambatan hati, penyejuk qalbu dan guru spiritual oleh umat. Melalui manajemen qalbu, Aa Gym memberikan motivasi dan semangat serta optimisme dalam beragama dan bermasyarakat, demikian juga Ust. Arifin, melalui dzikirnya berusaha membangkitkan spiritualisme dan keimanan serta ketulusan hati.

Kehadiran Aa Gym menjadi fenomena tersendiri dalam konteks Indonesia sekarang ini. Di tengah krisis yang panjang dalam berbagai dimensinya, terutama krisis kepemimpinan umat, kehadiran sosok Aa Gym dirasakan sekali oleh masyarakat. Melalui mimbar dan ceramahnya, seakan umat (jamaah) dibawa pada suatu tingkat kesadaran akan jati dirinya. Melalui aktivitas sosial dan ketawadu'annya serta sifat, sikap dan perilakunya, umat menjadikan beliau sebagai tauladan dan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran yang dimainkan oleh Aa Gym dan posisinya yang independen, menjadikannya mendapat predikat sebagai "the holy Man", manusia suci, oleh Majalah Time (2003).

Fenomena Aa Gym barangkali hampir sama dengan fenomena KH. Zainuddin, MZ, sebelum dia masuk dalam wilayah politik praktis. Kedua Kyai atau da'i ini bagai magnet, mampu menyedot ribuan masyarakat untuk berbondong-bondong mendengarkan ceramah yang disampaikannya. Tetapi tidak terjadi demikian bagi KH. Zainudin MZ ketika beliau masuk dalam dunia politik, bahkan ada sebagian masyarakat yang dulu gandrung dengannya, kini agak bernada sinis dan mencemooh peran yang dimaikannya sekarang.

Kedua fenomena di atas sebenarnya memberikan gambaran terhadap sikap masyarakat kita bagaimana respon masyarakat terhadap peran dan posisi Kyai dalam merespon perpolitikan. Kyai yang ikut arus politik akan selalu dicurigai oleh kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengannya atau tidak menjadi partisipannya, sebaliknya kyai independen, yang tidak terkontaminasi oleh perpolitikan akan selalu dinantikan oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi, pengambilan keputusan oleh beberapa Kyai untuk ikut atau tidak ikut dalam arus perpolitikan bukanlah masalah benar-salah, semuanya pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun umat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Wa Allah a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi, 1996, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Madernisme*, Paramatiina, Jakarta.
- bambang Trim (ed), *Aa Gym Apa adanya: Sebuah Qalbugrafi*, MQ Publishing, Bandung, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1994, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES.
- Dirdjoesanjoto, Pradjarta, 1994. *Memelihara Umat, Kyai diantara usaha pembangunan dan mempertahankan identitas lokaZ di daerah Muria*, Amsterdam: VU University Press.
- Geertz, Clifford, 1981, *Abangan, Santri dan Prayayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin., Jakarta: Pustaka Pelajar
- Hartono & Zulfidar, 2403, *Bala Kyai dipertuhankan, membedah sikap beragama NU*, Pustaka a1-Kausar, Jakarta.
- Horikosi, H., 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta, P3M., Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan, Noer, Delliari, 1989, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* Jakarta, LP3ES, Wahid, Abdurrahman, 1988, *Pesantren Sebagai Sub Kultural; Dalam Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta, LP3ES.
- Ziemek, 1986, *Pesa.ntren Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta, P3M.

*) Penulis adalah Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang